

Program Bimas Ditinjau Kembali

Sudarsono HARDJOSOEKARTO*

PENDAHULUAN

Setelah hampir 20 tahun sebagai primadona untuk program peningkatan produksi pangan, program Bimas akan ditinjau kembali. Peninjauan ini, terutama mengenai kemungkinan penghapusan kredit Bimas, diinstruksikan sendiri oleh Presiden pada saat sidang kabinet terbatas tanggal 1 Agustus 1984 yang lalu. Direncanakan pula bahwa peninjauan ini akan berlaku tahun depan, yang artinya efektif sejak tahun fiskal 1985/1986.

Terhadap rencana ini timbul reaksi yang beraneka-ragam, yang datang dari para ahli, politisi maupun masyarakat umum. Di antaranya ada yang setuju dan tidak sepenuhnya setuju. Tentunya yang menarik bukan hanya reaksinya, tetapi juga sejauh mana rencana tersebut akan direalisasikan dan implikasinya terhadap pembangunan di bidang pangan khususnya dan di bidang ekonomi pada umumnya. Karena itu menarik sekali bila dilakukan studi evaluatif terhadap program Bimas yang sudah berjalan cukup lama. Tulisan ini merupakan upaya studi evaluatif terhadap sebagian aspek mengenai Bimas. Dengan harapan kiranya menambah khasanah pemikiran untuk kebijakan pangan di masa mendatang.

KEBIJAKAN

Bimas, sebagai metode berproduksi padi dikembangkan pertama kali oleh tim IPB pada tahun 1963/1964. Bermula dari praktek lapang para mahasiswa yang menerapkan berbagai teknik berproduksi padi. Ternyata ditemukan bahwa kumulasi berbagai teknik berproduksi - yang belakangan dikenal sebagai Panca Usaha Tani - mampu melipatgandakan hasil produksi padi.

*Staf CSIS.

kerjasama atau kegotongroyongan di antara seluruh anggotanya sendiri. Hanya kalau kerjasama ini betul-betul sudah berlangsung di dalam usaha ekonomi koperasi sendiri, maka koperasi akan berkemampuan menciptakan suasana kerjasama dengan kekuatan ekonomi lain dalam masyarakat. Walaupun perlu bekerjasama dengan kekuatan lain, namun demikian koperasi terlebih-lebih perlu bekerjasama dengan sesama koperasi sendiri. Kerjasama dengan koperasi lain ini di samping untuk saling mengembangkan koperasi-koperasi yang sama-sama badan ekonomi yang berwatak sosial juga untuk melatih koperasi-koperasi agar semakin mampu bekerjasama dengan kekuatan ekonomi di luar koperasi.

Meskipun berwatak sosial, koperasi sebagai badan ekonomi tidak boleh melalaikan corak ekonominya yaitu mencari keuntungan, pandai-pandai menampilkan bonafiditas, dan berusaha meningkatkan kualitas pada khususnya dalam bekerjasama dengan kekuatan lain. Apabila mengabaikan hal ini, pasti koperasi akan lemah daya saingnya. Maka itu penting menjadi kebiasaan pengelola koperasi untuk terus-menerus meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan berkoperasi dari para anggotanya, yaitu secara konkrit untuk senantiasa menyempurnakan mutu hasil-hasil koperasi mereka. Bila saja hasil-hasil koperasi terjamin mutunya dan terjaga bonafiditas koperasi, tentulah koperasi disegani dan mendapatkan kerjasama usaha yang semakin besar dari kekuatan ekonomi lain.

Sebagai Gagasan Rangkuman

Pembinaan berbagai hal tadi secara serius dan berkesinambungan menjadi syarat mutlak untuk memantapkan kehidupan dan pertumbuhan koperasi di pedesaan, supaya koperasi berhasil meningkatkan kesejahteraan anggotanya dan masyarakat. Unit-unit koperasi desa yang paling berhasil hendaknya dijadikan percontohan untuk pengembangan koperasi desa yang lain atau berikutnya. Apabila sudah terbangun sejumlah besar koperasi yang berhasil, perlulah dilaksanakan saling kerjasama di antara semua koperasi di daerah itu demi menciptakan kondisi penggalakan dan kegairahan perkembangan koperasi-koperasi khususnya bagi koperasi yang masih belum berhasil.

CATATAN AKHIR

Kerjasama ekonomi memang seharusnya menjadi corak kehidupan bentuk usaha koperasi, pada khususnya kerjasama atau gotong-royong di antara seluruh anggota koperasi sendiri. Apabila kerjasama ini terus-menerus digiatkan di dalam usaha intern koperasi primer, maka ada landasan kuat koperasi

Tugas membina koperasi akan lebih berhasil, apabila instansi koperasi bekerjasama terpadu dengan instansi pemerintah yang lain (misalnya instansi pertanian, perindustrian) atau lembaga swasta yang berkepentingan. Agar instansi-instansi koperasi itu betul-betul membina perkembangan koperasi di wilayahnya, memang dibutuhkan kontrol dan evaluasi periodik oleh instansi koperasi atasannya atau oleh lembaga perwakilan rakyat setempat dan pers/mass-media. Karena bidang ekonomi merupakan ujung tombak pembangunan untuk kesejahteraan rakyat, maka semua pihak perlu menyadari pentingnya membantu pengembangan koperasi ini. Mengingat koperasi sudah diyakini sebagai konsep dan strategi yang sebaik-baiknya, maka jika koperasi kurang berhasil meningkatkan kesejahteraan berarti orang-orang pelaksanaannya yang belum baik: apakah itu para pengelola koperasi atau pembina koperasi dari instansi pemerintah. Mereka inilah yang harus ditingkatkan atau dibenahi secara tuntas.

Pemupukan Modal yang Terus-menerus

Pemupukan modal memang terutama didasarkan pada pengumpulan simpanan pokok, simpanan wajib, dan simpanan sukarela. Maka supaya terhimpun modal yang sebesar-besarnya, sewajarnya jika ada rangsangan/imbalance tertentu bagi anggota yang melakukan simpanan besar, misalnya berupa prioritas dalam pelayanan dan hak. Kemudian dari sisa hasil usaha setiap tahunnya pun dapat diharapkan peningkatan modal lagi. Dengan telah dibentuknya Bank Umum Koperasi Indonesia (Bukopin) sekarang ini, telah tersedia sumber dana atau permodalan baru untuk pengembangan usaha koperasi dan tercipta wadah tempat menabung untuk dana-dana yang berlebihan dari unit-unit koperasi tertentu.

Pengumpulan modal yang terus-menerus ini adalah penting dalam rangka pembesaran atau perluasan usaha koperasi, supaya koperasi berdaya mampu semakin meningkatkan kesejahteraan anggotanya maupun masyarakat. Modal ini pun bermanfaat sebagai dana untuk pembelian produksi dari anggotanya. Sebab sering terjadi karena tiadanya dana atau terlambat/belum cairnya kredit dari pemerintah menyebabkan para petani menjual hasilnya kepada tengkulak. Sebagai contoh diberitakan bahwa sampai kini para petani di beberapa kecamatan di Bojonegoro, Jawa Timur, menjual gabahnya kepada tengkulak dengan harga Rp 80,00 - Rp 95,00 per kg. Baru kemudian tengkulak nanti menjualnya kepada KUD dengan harga pemerintah Rp 145,00 per kg, setelah kredit pemerintah untuk KUD cair.¹ Dengan demikian koperasi tidak menyejahterakan para petani anggotanya melainkan menyejahterakan tengkulak.

¹Harian *Merdeka*, 7 April 1983 dan *Sinar Harapan*, 21 Mei 1983.

Supaya koperasi semakin bermanfaat untuk kepentingan anggota dan langganannya, seyogyanya para pengelola diarahkan pada ambisi melayani sampai dapat menyaingi para tengkulak atau rentenir. Sampai sekarang tampaknya rakyat masih suka menjual produksinya kepada tengkulak meskipun dengan harga lebih rendah dan mau meminjam uang pada rentenir meskipun dengan bunga tinggi. Ini disebabkan tengkulak atau rentenir bersedia mendatangi rumah-rumah penduduk walaupun perhubungan sulit, tidak dengan macam-macam persyaratan, dan pokoknya merakyat secara luwes. Mereka tidak birokratis dan tidak keberatan bekerja bagaikan tanpa batas waktu (buka 24 jam). Maka jika pengelola koperasi berambisi memajukan koperasi, mereka tidak boleh kalah baiknya daripada tengkulak atau rentenir dalam melayani anggota atau langganan.

Pendayagunaan Pengawasan Intern dan Ekstern

Sudah pasti berbagai kesemrawutan, salah urus, penyelewengan, atau kelalaian akan sangat merintangikan kelangsungan hidup dan perkembangan usaha koperasi. Sebab itu untuk mengembangkan koperasi dituntut berfungsinya faktor pengawasan: di samping untuk mencegah penyimpangan-penyimpangan yang mungkin terjadi, juga untuk memperbaiki ketidakberesan yang telah ada. Supaya pengawasan dirasakan lebih positif, hendaknya ia mengemukakan perluasan cakrawala pemikiran sampai memberikan alternatif dan memperdalam kesadaran serta tanggung jawab pada mereka yang diawasi. Fungsi pengawasan demikian ini akan efektif, bila dilaksanakan secara periodik dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama, misalnya sebulan sekali atau setidak-tidaknya tiga bulan sekali.

Mekanisme pengawasan dalam koperasi kita pada dasarnya dilakukan secara intern dan ekstern. Pengawasan intern dijalankan oleh para anggota koperasi dan khususnya dilakukan oleh badan pemeriksa keuangan koperasi. Sedangkan pengawasan ekstern berasal dari luar unit koperasi itu, yang khususnya dilakukan oleh instansi Departemen Koperasi setempat. Belum berfungsinya pengawasan intern koperasi secara efektif perlu ditingkatkan atau diperkuat oleh perhatian dari pengawasan ekstern. Konkritnya pembinaan yang betul-betul dari para pejabat instansi koperasi, pertanian, perindustrian, perbankan, dan lain-lain instansi pemerintah yang menurut GBHN harus mendahulukan pembangunan ekonomi masyarakat; supaya dari terbangunnya ekonomi rakyat akan meningkatlah kemampuannya untuk membangun semua bidang non-ekonomi. Dengan terselenggaranya pengawasan ekstern bekerjasama dengan pengawasan intern koperasi, maka dapat semakin diaktifkan berlangsungnya pengawasan intern dan partisipasi dari anggota koperasi untuk terus-menerus memajukan koperasinya.

swasta.¹ Angka ini sudah merupakan kemajuan bila dibandingkan dengan data dari tahun 1979, di mana menurut Prof. Dr. Mubyarto sektor perusahaan negara menguasai 12%, sektor koperasi 2%, dan sektor swasta 86% dari perekonomian nasional.²

Dengan potensi perkembangan itu citra negatif yang masih dilekatkan pada koperasi tentulah bisa semakin dihapuskan, sebagaimana gambaran buruk mengenai perusahaan negara dan usaha swasta pun dapat menghilang. Seperti dahulu perusahaan negara dipikirkan sebagai sarang korupsi dan salah urus atau usaha swasta sebagai usaha spekulasi dan manipulasi serta penghisap tenaga/uang rakyat. Dengan dibentuknya Departemen Koperasi dalam Pelita IV ini jelas pemerintah bertekad untuk membangun perkoperasian secara terus-menerus dan bahkan lebih intensif lagi. Pembangunan koperasi dimaksudkan supaya lebih berdaya guna semakin mengembangkan ekonomi masyarakat lemah, sehingga segenap warga negara secepatnya mampu lepas landas dalam pembangunan nasional. Hal ini menjadi tantangan bagi 15.426 orang karyawan Departemen Koperasi sekarang ini, yaitu menarik dan menggiatkan partisipasi masyarakat guna memantapkan dan meluaskan koperasi sebagai sarana meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan.

Apabila selama empat tahun Pelita III volume usaha koperasi di Indonesia dapat meningkat hampir tiga belas kali, maka dalam Pelita IV yang lebih intensif membangun perkoperasian seharusnya volume usaha koperasi dilipatgandakan dari sekitar Rp 2 trilyun itu setidaknya-tidaknya menjadi lebih dari Rp 26 trilyun pada akhir Pelita IV. Negara kita dapat mencontoh pembangunan perkoperasian di negara-negara maju yang dalam sejarahnya bahkan berekonomi kapitalis-liberal, namun ternyata berhasil mengembangkan perkoperasian menjadi kekuatan besar di samping kekuatan ekonomi lainnya.

Contoh keberhasilan koperasi di negara maju tersebut seperti di Finlandia 40% perdagangan eceran diselenggarakan oleh koperasi, di Norwegia dan Swedia 20% pertokoan adalah milik koperasi, dan di Belanda 60% produksi pertaniannya dijual melalui koperasi. Malahan di Denmark 80% kepala keluarga merupakan anggota koperasi. Sementara itu di Inggris koperasi konsumsi mampu melayani 25% dari kebutuhan penduduknya, sedangkan di Amerika Serikat koperasi pertanian menguasai 40% perdagangan padi-padian dan 98% listrik pedesaan diselenggarakan oleh koperasi. Kemudian di Jerman Barat bank koperasi dapat berkembang pesat, sehingga di seluruh Jerman dilayani 9.500 buah kantornya.³

¹Berita *Antara*, 16 Desember 1983.

²Harian *Kompas*, 9 Juli 1983.

³Harian *AB*, 20 Juli 1984.

kitar 2 juta orang, atau bertambah rata-rata 44,02% setahun.¹ Jadi dari petani pedesaan yang tergolong masyarakat ekonomi sangat lemah ada sekitar 13 juta orang, dan jika mereka ini dalam keluarganya rata-rata menghidupi 5 orang, maka berarti ada 65 juta penduduk petani miskin di pedesaan. Jumlah masyarakat ekonomi lemah ini akan meningkat lagi kalau ditambah dengan penduduk ekonomi lemah dari sektor perdagangan, buruh industri, dan sektor jasa.

Untuk memberantas kemiskinan itu, pemerintah dan bangsa Indonesia melancarkan berbagai program untuk meningkatkan produksi kaum miskin yaitu dengan pembangunan irigasi, perhubungan, bimbingan pertanian/peternakan, industri kecil, perkreditan, transmigrasi, pariwisata, perluasan lapangan kerja, dan sebagainya. Peningkatan berbagai sektor produksi ini pasti sukar terwujud, apabila tidak ditunjang oleh pembangunan bidang pemasaran, distribusi, permodalan, dan kewiraswastaan penduduk miskin pedesaan setempat. Sebab itu memang tak kalah serius dan mendesaknya upaya menangani pengembangan perkoperasian untuk membina bidang pemasaran, distribusi, permodalan, dan kewiraswastaan secara mantap dan terus meningkat.

Supaya perkembangan ekonomi pedesaan dipacu sehingga tidak semakin tertinggal dalam pembangunan nasional, maka pemerintah menempuh sistem pembangunan ekonomi BUUD (Badan Usaha Unit Desa) dan KUD (Koperasi Unit Desa). Agar di pedesaan dapat berkembang suatu koperasi sebagai badan usaha yang bermanfaat dan terandalkan, khususnya pendirian KUD dipersiapkan melalui rintisan BUUD. Yaitu dari BUUD yang tak diragukan lagi pertumbuhan usaha dan kemampuannya menyejahterakan masyarakat desa, siap untuk ditingkatkan menjadi KUD. Dengan ini BUUD dibina mencapai badan usaha yang kukuh dan memadai untuk menjadi KUD yang dapat berkembang mantap dan sekaligus menghapus citra keliru bahwa koperasi tak mampu meningkatkan taraf hidup.

Apabila koperasi diharapkan menjadi wahana yang menumbuhkan ekonomi masyarakat lemah dan pemeratakan hasil-hasil pembangunan masyarakat, jelaslah koperasi harus dibina menjadi bangun usaha ekonomi yang sehat sehingga mampu berkembang. Dari koperasi yang sehat perkembangannya ini akan tampil bobot koperasi yang disegani sebagai partner usaha bagi pihak usaha swasta atau perusahaan negara. Upaya pembangunan perkoperasian di tanah air ini menjadi unit-unit usaha ekonomi yang kuat, mulai terasa hasilnya adalah semenjak Pelita III, setelah pemerintah lebih aktif mengembangkan perkoperasian melalui lembaga Menteri Muda.

¹Prof.Dr. Ace Partadireja dalam harian *Kompas*, 11 Pebruari 1983 dan Menteri Transmigrasi/Ketua Umum HKTI, Martono dalam harian *Suara Karya*, 2 Mei 1983.

kan kemudahan tertentu. Terutama dengan berkoperasi dapat dilatih dan digalakkan jiwa ekonomi/wiraswasta mereka: tahu memperhitungkan pengeluaran dan pemasukan, bersemangat hemat dan menabung, keinginan berinvestasi, berpikiran jauh ke hari depan, dan mau menghargai waktu. Lagi pula sistem koperasi tidak memupuk jiwa ekonomi egois, melainkan jiwa ekonomi sosial: yaitu memupuk semangat persatuan (keakraban), gotong-royong, diskusi-musyawarah, demokratis, menghormati sesama warga masyarakat, menginginkan kesejahteraan umum.

Sebaliknya koperasi-koperasi pun merupakan wadah yang menampilkan sasaran yang jelas untuk membantu masyarakat ekonomi lemah dari pihak pemerintah. Program pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang berpendapatan rendah dengan mudah menyalurkan pembinaan dan bantuannya kepada koperasi yang berdisposisi memungkinkan perkembangan mereka. Begitu pula pihak-pihak swasta, cendekiawan, atau warga masyarakat yang mau mengamalkan nasionalisme atau patriotisme untuk peningkatan kesejahteraan sesama warga bangsanya yang lebih lemah, mendapatkan medan yang subur guna perkembangan kesejahteraan itu.

Dalam perekonomian Indonesia yang amat besar wilayah dan sangat luas sektor-sektornya, memang dibutuhkan pembentukan unit-unit koperasi yang sebanyak-banyaknya. Mengenai besarnya setiap unit koperasi disesuaikan dengan efisiensi dan efektivitas optimalnya guna pengembangan kesejahteraan penduduk setempat. Karena wewenang pembangunan koperasi secara nasional berada pada satu departemen yaitu Departemen Koperasi dan instansi bawahannya, maka sebenarnya jaringan kerjasama yang saling membantu antara setiap koperasi akan lebih mudah dilakukan. Misalnya kerjasama antara koperasi produksi dan koperasi konsumsi atau koperasi jasa, kerjasama antara koperasi pertanian dan koperasi peternakan atau koperasi industri. Sebagai akibatnya, kerjasama yang serentak dan perkembangan bersama dari seluruh koperasi ini akan terus-menerus menumbuhkan kekuatan ekonomi masyarakat lemah dan semakin berdaya mampu memeratakan hasil pembangunan masyarakat.

Akhirnya pentinglah disadari, bahwa sistem perkoperasian dapat menyumbang banyak untuk kesejahteraan umum. Pengelolaan jaringan ekonomi secara koperasi lebih menjamin penyediaan, pengadaan, distribusi barang dan jasa yang dibutuhkan masyarakat dan bahkan untuk semakin meningkatkannya dalam hal kualitas maupun kuantitasnya. Begitu juga lebih dimungkinkan terciptanya stabilisasi dan perimbangan harga-harga dari barang atau jasa itu. Perkoperasian yang terus-menerus menaikkan daya beli masyarakat berpendapatan rendah dan sekaligus "mewajarkan" (mengurangi/mengadilkan) keuntungan masyarakat ekonomi kuat, berakibat semakin memeratakan kekayaan masyarakat. Lalu bersamaan dengan corak koperasi yang menanam-

ekonomi bangsa, terutama ekonomi bangsa di daerah pedesaan yang pada umumnya masih tergolong ekonomi lemah. Sebab itu tidak ada pilihan lain kecuali: pemerintah dan rakyat Indonesia hendaknya secara konsekuen bekerja keras untuk membina keberhasilan koperasi dan membudayakan koperasi yang berhasil itu.

UNIT-UNIT KOPERASI: SUMBER DAYA PEMERATAAN DAN PERTUMBUHAN EKONOMI

Dalam kehidupan ekonomi masyarakat dianut adanya prinsip: "mencari pendapatan semaksimal mungkin dengan pengeluaran ongkos tertentu." Prinsip ini dipegang teguh oleh para pelaku ekonomi, supaya usaha ekonominya terus-menerus meningkat. Untuk itu pelaku ekonomi menggunakan perhitungan yang saksama dan selengkap-lengkapny demi membuat rencana serta pelaksanaan usaha yang matang dan efektif. Usaha ekonomi yang terjadi dalam masyarakat ini tak terhindari berlangsung dalam persaingan di antara berbagai pelaku ekonomi.

Dalam persaingan ini orang berupaya untuk memenangkan usaha ekonominya, dan baru merasa aman bila dapat mengalahkan atau meninggalkan usaha saingannya. Justru kadang-kadang perkembangan para saingan dianggap sebagai bahaya bagi kemajuan usahanya sendiri. Memang dalam ekonomi masyarakat yang bersaing ini dituntut pula adanya kerja sama dari berbagai usaha. Namun atas dasar prinsip ekonomi di atas, kerjasama usaha ini diterima serta digiatkan apabila bisa menguntungkan kemajuan usahanya itu, dan tidak diinginkan lagi kerjasama apabila sudah tidak memberi manfaat.

Demikianlah kondisi yang terjadi, jikalau usaha ekonomi hanya dimotori oleh cita-cita mencari pendapatan setinggi-tingginya: yaitu konkritnya berupa keuntungan uang yang sebanyak-banyaknya. Padahal dalam proses ekonomi masyarakat terdapat kekuatan-kekuatan yang tidak seimbang, yang kesemuanya ingin hidup, maju, dan bisa menentukan perolehan hasil-hasil dari pembangunan masyarakat. Dari persaingan mencari keuntungan secara adu kuat itu, akibatnya sebagian masyarakat kalah bersaing dan terpaksa menderita posisi lemah dalam "daya menawar" (bargaining power).

Menghadapi golongan ekonomi kuat jelas bagian masyarakat yang berekonomi lemah tidak/kurang berdaya. Justru di antara masyarakat ekonomi lemah sendiri masing-masing saling bersaing untuk mengambil manfaat dari ekonomi masyarakat. Namun mereka hanya akan dilibatkan dalam ekonomi masyarakat, sejauh memberi manfaat/keuntungan pada kelangsungan atau perkembangan pihak ekonomi kuat. Jadi secara kasarnya, mereka tergantung dan diperalat semata-mata.

studi kasus ini menguakkan beberapa hal yang menarik perhatian dapat dijadikan pegangan dalam usaha menyalurkan informasi yang tepat kepada masyarakat pedesaan sejalan dengan usaha pembangunan di daerah pedesaan.

Dana pembangunan yang diperoleh Pemerintah Daerah sebagian besar berasal dari Pemerintah Pusat. Sejauh mana dana tersebut dapat mencapai sasarannya sangat tergantung kepada kemampuan pemerintah di daerah untuk memanfaatkannya. Dalam beberapa waktu yang lalu pemerintah mengatakan bahwa Propinsi Sumatera Barat memperoleh "Parasamya Purna Karya Nugraha." Keberhasilan ini tentu menimbulkan keingintahuan mengenai pembangunan di daerah tersebut. Untuk ini Rustian KAMALUDDIN dan Iswandi ISKANDAR mengungkapkan beberapa hal yang menyangkut pembangunan di Sumatera Barat dalam tulisannya yang berjudul, "Investasi Pemerintah di Sumatera Barat: Perkembangan, Sasaran dan Kebijakan." Dengan tulisan-tulisan ini, hal-hal yang berkaitan dengan usaha pembangunan pedesaan semakin jelas sehingga memungkinkan dilakukannya langkah-langkah yang lebih terarah.

Oktober 1984

REDAKSI

Pengantar Redaksi

Salah satu masalah yang umumnya dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang dalam pembangunannya adalah masalah peningkatan percepatan pembangunan di daerah pedesaan. Sejarah telah membuktikan bahwa di beberapa negara yang sedang berkembang perkembangan pedesaan selalu kalah cepat dari perkembangan di daerah perkotaan padahal sebagian terbesar penduduk dari negara yang bersangkutan berada di pedesaan. Terjadinya hal seperti ini telah menimbulkan berbagai masalah seperti masalah urbanisasi dengan segala akibatnya, masalah kepincangan pembagian pendapatan dengan seluruh pengaruhnya dan masalah perasaan keterasingan dari sebagian anggota masyarakat dalam proses pembangunan.

Timbulnya akibat ikutan sebagai produk perbedaan kecepatan dalam pembangunan kadang-kadang memaksa para pembuat keputusan untuk menanggulangi akibat ikutan tersebut tanpa mengkaji lebih dalam lagi tentang sebab-musabab hal tersebut terjadi. Tindakan seperti ini tentu hanya akan memberi hasil yang bersifat sementara.

Indonesia dalam pembangunannya tidak terlepas dari masalah seperti ini sehingga perlu diketengahkan agar setiap persoalan dapat dipecahkan secara mendasar. Hal ini berarti bahwa yang perlu diusahakan adalah menciptakan persamaan perkembangan atau dalam istilah yang sering diketengahkan menciptakan keseimbangan. Usaha menciptakan keseimbangan pembangunan di daerah perkotaan dan daerah pedesaan tentu mempersyaratkan adanya pengetahuan yang memadai mengenai pedesaan itu sendiri. Mempertimbangkan hal ini, ANALISA kali ini menyetengahkan beberapa tulisan yang berkaitan dengan pembangunan di pedesaan.

Dalam tulisan pertama yang berjudul "Perkoperasian Membangun Ekonomi Masyarakat Pedesaan," Sunarto NDARU MURSITO, mengemukakan bahwa usaha koperasi mempunyai pengaruh besar terhadap pertumbuhan dan

ANALISA

Diterbitkan oleh CENTRE FOR STRATEGIC AND INTERNATIONAL STUDIES (CSIS) sebagai terbitan berkala yang menyajikan analisa-analisa peristiwa dan masalah internasional dan nasional, baik ideologi dan politik maupun ekonomi, sosial budaya dan pertahanan serta keamanan, yang ditulis oleh Staf CSIS. Tetapi ANALISA juga menerima tulisan-tulisan dari luar CSIS dan menyediakan honoraria bagi karangan-karangan yang dimuat. Tulisan-tulisan dalam ANALISA tidak selalu mencerminkan pandangan CSIS.

*Pemimpin Redaksi/
Penanggung Jawab*

Pande Radja SILALAH I

Dewan Redaksi

Daoed JOESOEF
Rufinus LAHUR
J. PANGLAYKIM
A.M.W. PRANARKA
M. Hadi SOESASTRO
Harry TJAN SILALAH I
Jusuf WANANDI
Kirdi DIPOYUDO
A. Sudiharto DJIWANDONO
Djisman S. SIMANDJUNTAK
J. Soedjati DJIWANDONO
Ronald NANGO I

Redaksi Pelaksana

Pande Radja SILALAH I
Ronald NANGO I

STT

SK Menpen RI No. 509/SK/DITJEN PPG/STT/1978,
tanggal 28 Agustus 1978

ISSN

0126-222X

Alamat

Redaksi : Jalan Tanah Abang III/27, Jakarta 10160,
Telepon 356532 - 35

Tata Usaha : Biro Publikasi CSIS, Jalan Kesehatan 3/13,
Jakarta 10160, Telepon 349489